



TA 2024

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**



**DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTA (LKJIP)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

HALAMAN VERIFIKASI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTA (LKJIP)
Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024

Catatan :

Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Kesehatan dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJIP/LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (RENSTRA), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi upaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta memberikan gambaran secara utuh data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja dan menjadi bahan evaluasi dan perencanaan ke depan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan ini disusun agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 17 Februari 2025

**Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Penduduk dan KB**



....., S. Si, M. Si, Apt.
: Pembina Tk.I
NIP : 19760824 200901 1 002

Akhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-BK) dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau, mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan, meningkatkan pembiayaan kesehatan yang cukup untuk peningkatan status kesehatan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, kematian ibu, menurunnya kesakitan karena penyakit menular dan perbaikan gizi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 80/ 2023 tanggal 16 Januari 2025 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, dengan berdasarkan kepada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional adalah seluruh Peraturan Perundangan yang berlaku dan terkait dengan LKJIP.

LKJIP ini berisikan Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kesehatan, Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Subkegiatan dan Indikator Kinerja tujuan, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024 serta Penutup.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini perlu ketahui oleh seluruh petugas kesehatan, lintas sektor yang terkait dengan kegiatan kesehatan, swasta dan masyarakat yang telah berkomitmen dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta perlu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan permasalahan untuk mendapatkan masukan- masukan yang bersifat perbaikan.

Kata kunci : Laporan LKJIP Bidang Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A. No. 2 Kabupaten Sidrap
Kode Pos 91611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 16 Tahun 2025

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 maka dirasa perlu membuat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Tingkat Dinas Kesehatan, Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/ IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025.

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini diterbitkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
Pada Tanggal, 30 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang,



Andin, S.Si, M. Si, Apt.
Lagkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 200901 1 002

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR	i
HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
SK KEPALA DINAS KESEHATAN	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Fungsi Strategis Dinas Kesehatan.....	2
1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kesehatan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	10
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	13
2.3 Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	31
a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun 2024.....	32
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	33
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026.....	35
d. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan.....	36
e. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	50
f. Analisa Program /Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	52
3.2 Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Langkah Kedepan.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN LKJIP
TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dimaksud sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang efektif-efisien, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Kesehatan selama satu tahun baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang kesehatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh pegawai. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 1.956 orang, terdiri dari 962 orang PNS, 0 orang CPNS, 388 orang PPPK dan 606 orang TKPK (Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja). Dari 1.956 Pegawai tersebut ditugaskan di Dinas

Kesehatan Kota Surakarta, 2 UOBK, 17 UOBF dan 2 UPT yang ada, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tempat Penugasan dan Jenisnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

NO.	TEMPAT PENUGASAN	JUMLAH PEGAWAI			
		PNS	CPNS 2024	PPPK	TOTAL
1	Dinas Kesehatan	49	0	19	68
2	Puskesmas Baranti	37	0	26	63
3	Puskesmas Manisa	27	0	20	47
4	Puskesmas Pangkajene	53	0	23	76
5	Puskesmas Lawawoi	55	0	36	91
6	Puskesmas Bilokka	42	0	30	72
7	Puskesmas Kulo	29	0	8	37
8	Puskesmas Amparita	45	0	31	76
9	Puskesmas Tanru tedong	59	0	23	82
10	Puskesmas Barukku	34	0	28	62
11	Puskesmas Belawae	25	0	21	46
12	Puskesmas Lancirang	32	0	18	50
13	Puskesmas Dongi	36	0	15	51
14	Puskesmas Empagae	39	0	46	85
15	Puskesmas Rappang	47	0	19	66
TOTAL		609	0	363	972

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang Tahun 2024

1.2 Fungsi Strategis Dinas Kesehatan

Sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan di atas, maka untuk menjalankan fungsi tersebut dibutuhkan suatu rencana jangka menengah untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Rencana strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun yaitu sejak 2024-2026.

Perencanaan Tahun 2024-2026 adalah periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun dengan periode 3 (tiga) tahun saja Tahun 2024-2026 dan bukan merupakan penjabaran dari janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal tersebut disebabkan karena telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, sementara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun renstra perangkat daerah dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional

Serta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan memperhatikan uraian diatas maka Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra tidak lagi memasukkan visi dan misi karena mengikuti visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah “ Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”.*

Oleh karena itu dalam hal ini setiap Perangkat Daerah harus menjabarkan perencanaan strategisnya langsung ke dalam tujuan, sasaran, dan program serta kegiatannya sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, pada tujuan 2 dan sasaran 3 yaitu :

Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas SDM

Dalam rangka mewujudkan tujuan RPD yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka ditetapkan tujuan strategis berdasarkan urusan pemerintahan :

Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yaitu : *“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”* yang optimal dengan indikator tujuan *“meningkatnya indeks kesehatan”* bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan indikator meningkatnya Angka Harapan Hidup, maka ada 2 (dua) sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut :

Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan: *Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan* dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Usia Harapan Hidup (UHH)
2. Angka Kematian Ibu per 100. 000 kelahiran hidup
3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Mengacu uraian di atas maka pernyataan tujuan dan sasaran jangka pendek Dinas Kesehatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel TC- 1.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kondisi awal 2022	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN							
1. Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		1. Indeks Kesehatan	indeks	77,55	77,75	77,95	78,25
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70.41	70,60	70,80	71,01
		3. Angka Kematian Ibu (per Kasus kematian)	Per Kasus	19	18	17	16
		4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	18,30	16,90	16,50	16,00

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai serta diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan makna tersebut maka, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Sasaran yakni Meningkatkan pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan perencanaan strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan
6. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
7. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
8. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran

atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

Adapun kebijakan program Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditempuh melalui:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan
3. Intervensi berbasis resiko kesehatan
4. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekan pada tersedianya fasilitas kesehatan yang standar termasuk Jaminan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional dan Daerah Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
5. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga

1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kesehatan

Adapun permasalahan yang dihadapi pada pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas dan Jaringannya
2. Kuantitas dan kualitas Sarana dan prasana kesehatan yang sesuai standar belum memadai.
3. Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Posyandu masih ada yang belum Sesuai Standar
4. Masih ada ibu nifas yang belum memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar
5. Masih banyaknya neonatus dengan komplikasi yang belum tertangani dengan baik
6. Alokasi anggaran tidak mencukupi biaya kebutuhan
7. Masih ada kematian ibu sebanyak 8 orang
2. Masih ada kematian bayi sebanyak 89 bayi
3. Masih adanya balita stunting

4. Belum tercapainya 100% Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terutama cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (41,91%), pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (83,22%) dan pelayanan kesehatan Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV (82,09%)

Beberapa Isu Strategis yang berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, diantaranya:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Penurunan prevalensi balita stunting;
4. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

LAPORAN LKJIP
TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.1 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. IKU adalah core bussiness dan alasan keberadaan suatu organisasi. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan organisasi

dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kerja, yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator.

Penetapan Indikator kinerja Utama SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2024 - 2026 yang disajikan pada table berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
6.	Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100
7.	Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100
8.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
9.	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
10.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100
11.	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Persen	100
12.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100

Tabel 2. 2
Keselarasan RPD dan Renstra Yang Mengacu Pada indikator Tujuan Dan Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator sasaran RPD	Tujuan Restra Perangkat Daerah	Sasaran Restra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Restra Perangkat Daerah	Satuan	Target Capain 2024
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM.	Indeks kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Indeks Kesehatan	Indeks	77,75
							2. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70.60
							3. Angka Kematian Ibu (Per Kasus Kematian)	Per Kasus	18
							4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	16,90

2. 2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026, Rencana Kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapainya dalam tahun 2024.

Sasaran dan Indikator Kinerja kelompok sasaran Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINKES)			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.02.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK"	%	100
1.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)"	Dokumen	3
1.02.01.02.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)"	Dokumen	3
1.02.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)"	Dokumen	3
1.02.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)"	Dokumen	3
1.02.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)"	Dokumen	3
1.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)"	Laporan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)"	Laporan	3
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Dokumen	3
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3
1.02.01.2.02.07	Koordinasi Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	3
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Admistrasi Barang Milik Daerah	%	100
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3
1.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3
1.02.01.2.03.06	Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100
1.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Restribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Restribusi Daerah	Dokumen	3
1.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retrebusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Restribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retrebusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Restribusi Daerah	Dokumen	3
1.02.01.2.04.05	Pengelolaan Data Restribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Restribusi Daerah	Laporan	3
1.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Restribusi Daerah	Dokumen	3
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	%	100
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	3
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan	Dokumen	12
1.02.01.2.05.05	Monitoring dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan	Dokumen	1
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan ketersediann Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3
1.02.01.2.07	Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Jumlah Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerak	%	100
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1
1.02.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan alat mesin lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah PaketPengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	Bulan	12
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Umum pelayanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kendaraan	257
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kendaraan	257
1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	9
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	mesin	5
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	3
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	%	100
1.02.01.2.20.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,13
		2. Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten /kota yang terakreditasi	%	100
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
		8. Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100
		9. Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
		11. Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
		12. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100
		13. Persentase orang terduga TBC yang mendapat kan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	%	100
		14. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia	%	100
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	Unit	1
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	Unit	1
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	Unit	1
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Unit	1
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	Unit	1
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	3
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di Rehabilitasi dan mendapat Pemeliharaan	Unit	2
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	1
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	17
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	Unit	5
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)"	Rumah Sakit	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)"	Paket	55
1.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)"	KK	1500
1.02.02.2.01.25	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	"Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)"	DTPK	4
1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	"Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)"	Puskesmas	14
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ibu Hamil	5.958
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ibu Bersalin	6.700
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bayi	5.414
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	24.952
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Siswa	54.670
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	194.892
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Usia Lanjut	20.907

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17.810
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2.768
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	550
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5.839
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7.663
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	PKM	14
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana	Jumlah Puskesmas pada Kondisi terdampak krisis kesehatan akibat bencana yang melakukan Pelayanan Kesehatan	PKM	14
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Orang	40.200
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	PKM	14
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	PKM	14
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	PKM	14
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PKM	14
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	PKM	14
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	orang	220

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menula	orang	17.9
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	Orang	14.7
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Orang	1.5
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	PKM	14
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kec.	11
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapat Telemedicine	PKM	14
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang mendapat Biaya Operasional Pelayanan	RS	3
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat Biaya Operasional Pelayanan Puskesmas	PKM	14
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat biaya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PKM	14
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	PKM	10
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)"	Dokumen	2
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)"	Dokumen	2
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah perangkat Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang tersedia	Unit	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)"	Orang	850
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	Orang	300
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	Orang	890
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemokkan aktifitas merokok (Tatanan)"	PKM	4
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)"	Dokumen	1
1.02.02.2.02.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)"	Dokumen	1
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)"	Dokumen	1
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan Usia	"Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan usia (Dokumen)"	Dokumen	1
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	%	100
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	PKM/ Dinkes/ RS	17
1.02.02.2.04	Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terbit	%	100
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah sakit dan Fasyankes yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas D	RS/PKM	17
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit dan Fasyankes yang mendapatkan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RS/PKM	17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.02.2.04 .03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan Peningkatan Mutu pelayanan	PKM	14
1.02.02.2.04 .04	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah rumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan yang tersedia	Dokumen	1
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	%	80
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitas mendapatkan SIP	%	100
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	orang	1.4
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang	100
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	4
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	100
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	4
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	%	100
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	%	100
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	sarana	115
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumeyang tersedia tentang Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin	sarana	115
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat sertifikat	%	100
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat	sarana	10
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan	sarana	10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifikat Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	%	100
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifikat Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	PIRT	100
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapat Pengawasan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	%	100
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapat Pengawasan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	TPM	60
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat tindak lanjut pengawasan perizinan	%	100
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang mendapat pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	PIRT	100
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	75
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab./Kota	Cakupan Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan Target	Target 2024
1	2	3	4	5
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Posyandu aktif	243
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	%	100
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	41.1	44.9
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%	100
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	UKBM	155

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kesehatan telah melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp.198,765,638,253,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2024, Sasaran dan Indikator Kinerja kelompok sasaran Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Matriks Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Target
1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 1. KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
	2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	✓ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %
	3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	✓ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		✓ Penyelenggaraan informasi kesehatan secara terintegrasi	100 %
		✓ Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100 %
	✓ Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	
	✓ Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	75 %	
	✓ Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	

Tabel 2.4
Matriks Penganggaran Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Program	Anggaran		Ket.
		Sebelum	Setelah	
	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 86.380.402.845	Rp. 117.004.278.044	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 41.218.598.455	Rp. 42.737.920.552	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.058.082.000	Rp. 1.086.346.000	APBD
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 359.648.000	Rp. 371.648.000	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 73.919.000	Rp. 73.919.000	APBD
TOTAL		Rp.129,090,650,300	Rp.161,274,111,596	

Untuk target indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 sebelum perubahan dan setelah perubahan sama yaitu terdapat 1 sasaran dan 3 indikator sasaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum perubahan menetapkan 5 program, 20 kegiatan dan 78 sub kegiatan untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, setelah perubahan menetapkan 5 program, 20 kegiatan dan 75 sub kegiatan. Apabila dilihat dari jumlah sebelum dan setelah perubahan tidak mengalami perubahan baik jumlah program, kegiatan, tetapi apabila dilihat dari detail sub kegiatan ada 5 sub kegiatan yang mengalami penyesuaian sebelum dan setelah perubahan yaitu sub kegiatan sebagai berikut:

Sebelum Perubahan ada subkegiatan di bawa ini

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dan Setelah Perubahan ada penambahan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Penyesuaian Sub Kegiatan setelah perubahan mengalami pengurang empat subkegiatan dan penambahan satu subkegiatan yakni, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di hilangkan dan menjadi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya karena menyesuaikan jenis aktivitas dengan sub kegiatan yang tepat. Penyesuaian Sub Kegiatan Pengadaan Mebel karena ada pengadaan mebel untuk Rumah sakit Dua Pitue.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

LAPORAN LKJIP
TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, setidaknya terdapat 12 indikator Kinerja Utama (IKU) dan 3 indikator sasaran yang harus diwujudkan pada tahun 2024. Pertanggung Jawaban pengukuran yang diukur adalah capaian program, kegiatan, sub kegiatan dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, sub kegiatan dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

Bilamana indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

No	Rentang Nilai (%)	Deskripsi
1	90 s/d 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d 89,99	Berhasil
3	56 s/d 69,99	Cukup Berhasil
4	40 s/d 55,99	Kurang Berhasil
5	0 s/d 39,99	Tidak Berhasil

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	1. Indeks Kesehatan	78,75	83,77	106.37
		2. Usia harapan Hidup	70,80	74,45	105,15
		3. Angka Kematian Ibu (per kasus kematian ibu)	18	8	44,44
		4. Angka Kematian Bayi (AKB) (per kasus kematian bayi)	16,90	19,19	113,6
Rata Rata Capaian Kinerja					92.39

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada tujuan satu yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan menunjukkan realisasi capaian Indeks Kesehatan dengan angka 83,77 dari target indeks kesehatan yang ditetapkan sebesar 77,75 dengan capaian 107 % dan untuk indikator Usia Harapan Hidup menunjukkan realisasi capaian 74,45 dari target 70,80 dengan capaian 105% sedangkan untuk indikator angka Kematian Ibu (per kasus kematian ibu) sebanyak 8 kasus kematian dari target 5 kasus kematian dengan capaian kasus serta Angka Kematian Bayi (AKB) per kasus kematian bayi sebesar 89 kasus dari target 0 kasus dengan capaian 89 kasus (Antenatal).

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)
			TARGET	REALISASI	
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	96,09	96,09
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	98,10	98,10
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	97,40	97,40
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	99,45	99,45
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	96,59	96,59
6	Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	97,56	97,56
7	Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	83,22	83,22
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	41,91	41,91
9	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	95,95	95,95
10	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	97,78	97,78
11	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Persen	100	86,85	86,85
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	82,09	82,09
Rata Rata Capaian Kinerja					89,42

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi					Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2024
1. Indeks Kesehatan	Angka	82,82	83,08	83,34	83,57	83,77	97,80	99,60	99,88	101,9	107
2. Usia Harapan Hidup	Tahun	73,83	74	74,14	74,32	74,45	98,81	99,96	99,99	101,9	105
3. Angka Kematian Ibu (per kasus kematian ibu)	Kasus	6	7	5	5	8	35,46	33,33	15,00	26,32	44,44
4. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	per 1000 kelahiran hidup	3,8	4,5	1,0	8	19,19	22,83	23,08	5,38	45,45	113,6

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan belum mencapai target. Rata – rata capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
Perkembangan Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	84,4	92,5	83	77,25	96,09	84,4	92,5	83	77,25	96,09
2.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	96	89,10	98,10	100	100	96	89,10	98,10
3.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	99	92,51	97,40	100	100	99	92,51	97,40
5.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	86,4	100	82	81,03	99,45	86,4	100	82	81,03	99,45
6.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	49,7	99,4	99	100	96,59	49,7	99,4	99	100	96,59
7.	Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	43,05	39,8	73	76,72	97,56	43,05	39,8	73	76,72	97,56
8.	Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	58,69	12,1	76	82,16	83,22	58,69	12,1	76	82,16	83,22
9.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	23,75	65,3	27	27,78	41,91	23,75	65,3	27	27,78	41,91
10.	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	44,59	60,7	94	100	95,95	44,59	60,7	94	100	95,95
11.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	88,20	89,9	96	100	97,78	88,20	89,9	96	100	97,78
12.	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Persen	53,38	82,1	100	100	86,85	53,38	82,1	100	100	86,85
13.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	80,58	92,8	97	83,36	82,09	80,58	92,8	97	83,36	82,09
	Total Capaian	Persen	67.73	77.88	85.17	84.16	89.42	67.73	77.88	85.17	84.16	89.42

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja utama bidang kesehatan adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan target 100 % dan Rata-rata capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni naik menjadi dari tahun 2023 capaian 84,16% mengalami kenaikan sebesar 11.70% sehingga menjadi 89,42% berdasarkan aplikasi e-SPM kementerian dalam Negeri RI pada Tahun 2024.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2024 - 2026

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD Kabupaten dan RENSTRA Dinas Kesehatan Tahun 2024 - 2026.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Sampai Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET Renstra	REALISASI	CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	1. Indeks Kesehatan	77,75	83,77	107
		2. Usia harapan Hidup	75,10	74,45	105
		3. Angka Kematian Ibu (Per kasus kematian ibu)	18	8	44,44
		4. Angka Kematian Bayi (AKB) (Per1000 kelahiran hidup)	16,90	19,19	113,6

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada tujuan satu yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menunjukkan realisasi capaian indeks Kesehatan 83,77 dari target 77,75 dengan capaian 107% dan Angka Kematian Ibu (per kasus kematian ibu) sebesar 8 kasus dari target 18 dengan capaian 44,44% serta Angka Kematian Bayi (AKB) Per1000 kelahiran hidup dari target 16,9 per 1000 kelahiran hidup dengan angka kematian sebesar 19,19 per 1000 kelahiran hidup dari total angka kelahiran hidup 4.637 pada tahun 2024. Angka kematian bayi ini mengalami peningkatan angka dalam hitungan angka kematian bayi perkelahiran hidup sebab adanya perubahan definisi operasional yang di keluarkan oleh kementerian kesehatan RI terhadap angka rumus kematian bayi, yang sebelumnya tidak memasukkan dalam hitungan bayi yang lahir mati dan neonatus, sekarang dengan adanya aturan baru yang di buat maka semua bayi yang lahir, entah itu bayi lahir mati, bayi neonatus dan bayi yang berumur 29 hari keatas harus di hitung sebagai pembilang dalam hitungan rumus penghitungan jumlah angka kematian bayi dalam satu wilayah tertentu berdasarkan tahun tertentu.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Sampai Tahun 2024
Dengan Standar Nasional dan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2024 - 2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)
			TARGET	REALISASI	
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	96,09	96,09
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	98,10	98,10
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	97,40	97,40
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	99,45	99,45
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	96,59	96,59
6	Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	97,56	97,56
7	Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	83,22	83,22
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	41,91	41,91
9	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	95,95	95,95
10	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	97,78	97,78
11	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Persen	100	86,85	86,85
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	82,09	82,09
Kategori Indeks Pencapaian SPM		Kategori : TUNTAS MADYA			89,42

Target Untuk Standar nasional dan target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi indikator Kinerja Utama Pada dinas Kesehatan adalah masing-masing indikator dengan target indikator capaian sebesar 100%.

D. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

1. Angka Kematian Ibu (per kasus kematian ibu)

Angka Kematian Ibu, dengan realisasi kasus kematian tahun 2024 sebesar 8 kasus kematian ibu dari target 18 kematian ibu. Kematian ibu dihitung dengan jumlah kasusu karena target nasional hanya menggunakan rumus per100.000 kelahiran hidup sedangkan jumlah kelahiran hidup di kabuapten sidenreng Rappang tidak sampai dengan 100.000 kelahiran

hidup tahun 2024. Dapat dikatakan belum mencapai target 2024, yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah dasar penentuan target yang sangat tinggi dan bahkan sangat tidak memungkinkan untuk tercapai. Pada Tahun 2024 terdapat 8 Kematian Ibu yang disebabkan oleh Perdarahan dan Hipertensi yang mana kematian ini dapat di cegah apabila cakupan pelayanan disertai dengan mutu pelayanan yang baik. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal. Isu “tiga terlambat” masih menjadi masalah utama layanan kesehatan maternal, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat mendapat pelayanan yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan. Rendahnya kualitas pelayanan pemeriksaan kehamilan juga direfleksikan dari rendahnya pemenuhan standar antenatal care yang mencakup 10 pemeriksaan kehamilan.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah :

- a) Melaksanakan pendampingan dan OJT pemeriksaan USG bagi ibu hamil oleh Spesialis Obgyn yang dilaksanakan untuk dokter umum Puskesmas.
- b) Menggiatkan orientasi pengisian dan pemanfaatan buku KIA.
- c) Memotivasi peran kader sebagai penyampai informasi pertama adanya kejadian risiko kehamilan melalui revitalisasi GSI dan P4K.
- d) Peningkatan kapasitas bidan untuk dapat mendeteksi resiko lebih dini serta mampu menangani kegawat daruratan maternal dengan pelatihan PONED
- e) Meningkatkan edukasi kepada keluarga pasien tentang resiko pada ibu bila tidak segera dirujuk atau diberikan tindakan medis di kelas ibu hamil dan posyandu.

Upaya yang diajukan diatas adalah menjawab permasalahan yang masih muncul yaitu masih diperlukan penguatan deteksi dini risiko kehamilan agar semua petugas terampil mengenali tanda-tanda risiko kehamilan, melakukan Assessment, Diagnosa, Tatalaksana dan rujukan dengan tepat dan masih diperlukan peningkatan peran/kepedulian masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak melalui gerakan sayang ibu, gerakan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

2. Angka Kematian Neonatal (Bayi 28 hari)

Angka Kematian Neonatal (bayi umur 28 hari) dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 78 kasus kematian neonatal atau sebesar 18,82 kematian per1000 kelahiran hidup dari target 16.60 kematian bayi per1000 kelahiran hidup. Dapat dikatakan capaian melebihi tahun 2024, sebesar 0,82 per1000 kelahiran hidup yang menjadi alasan dasar alasan

tingkat capaian melebihi target adalah dasar penentuan target yang sangat rendah pada saat penyusunan renstra (Definisi operasional angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup waktu pembuatan Renstra saat ini sudah ada perubahan). Pada Tahun 2024 Kasus Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dengan penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, BBLR dan Prematuritas serta Kelainan Kongenital. Derajat kesehatan neonatal itu sendiri juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan ibu selama kehamilan, pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian perawatan antenatal serta perawatan bayi baru lahir dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Faktor yang mempengaruhi keselamatan bayi antara lain usia ibu saat hamil, paritas, dan jarak kelahiran. Selain faktor tersebut ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhinya, antara lain: ibu-ibu jarang memeriksakan kandungan, hamil di usia muda, jarak yang dengan kehamilan sebelumnya terlalu dekat, hamil di usia tua, ibu dan bayi kekurangan gizi, makanan yang dikonsumsi oleh ibu kurang higienis, serta fasilitas sanitasi dan higienitas yang kurang memadai.

Solusi yang dilakukan adalah :

- a) Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dengan upaya penurunan angka kematian ibu.
- b) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga kunjungan neonatal.
- c) Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan kompetensi SDM diikuti penguatan sistem rujukan (SisRuTe)

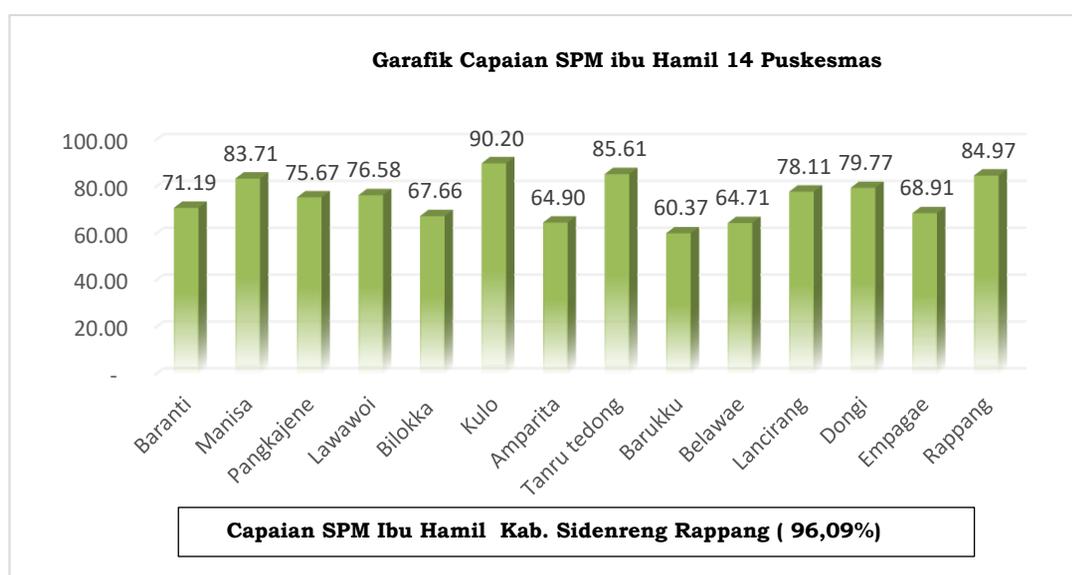
3. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi, dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 11 kasus kematian bayi atau angka 2,32 per1000 kelahiran hidup dari target 16,60 per 1000 kelahiran hidup. Jadi angka kematian bayi selama tahun 2024 jika di gabungkan antara kematian bayi neonatal dan bayi umur 29 hari keatas adalah sebesar 19,19 kematian bayi per1000 kelahiran hidup dengan total kelahiran hidup sebanyak 4.637 kelahiran hidup. Dapat dikatakan melebihi mencapai target 2024, yang menjadi alasan dasar tidak melebihi target adalah dasar penentuan target yang sangat rendah dan berdasarkan definisi operasional angka kematian bayi saat menentukan sasaran/target pada saat membuat renstra. Angka kematian bayi pada tahun 2024 dengan penyebab kematian yang paling besar adalah pneumonia dan Diare. Masih tingginya Kasus Pneumonia dan Diare pada bayi dikarenakan tidak lengkapnya imunisasi yang diperoleh.

Solusi yang dilakukan :

- Adanya sistem komunikasi yang efektif melalui Whatsapp Group rujukan Kegawatdaruratan (Gadar) Neonatal untuk mempercepat rujukan kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir.
- Adanya dukungan pembiayaan dari Pusat melalui DAK Non Fisik untuk pelatihan skrining PJB dan SHK bagi petugas puskesmas dan penyediaan pulse oximeter neonatal untuk puskesmas

4. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

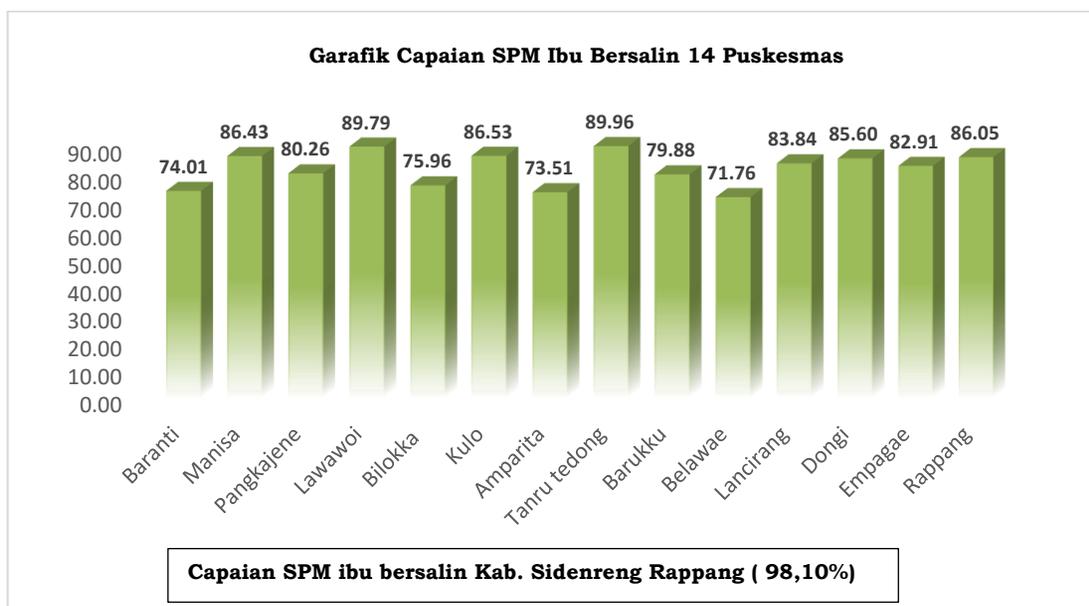


Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 96,09% dari target 100%. Dapat dikatakan belum mencapai target 2024, yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah adanya kunjungan ibu hamil di atas 12 minggu baru datang memeriksakan kehamilannya di mana penyebabnya adalah karena adanya kehamilan yang tidak di harapkan (Umur sudah tua, jarak yang terlalu dekat dan hamil di luar nikah) adanya kehamilan tidak sampai atern serta adanya ibu hamil yang tidak menetap di wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan tempat menjadi target/sasaran sehingga jumlah pemeriksaan kesehatan ibu hamil tidak sesuai dengan standar karena ada tahapan/prosedur pemeriksaan kehamilan yang sesuai standar yang tidak dilaksanakan.

Solusi yang dilakukan :

- Penguatan Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral, lintas program dan jejaring puskesmas
- Adanya kegiatan sosialisasi pentingnya pemeriksaan kehamilan sesuai standar yang telah di tetapkan
- Program kelas ibu hamil dan senam hamil
- Optimalisasi pendampingan bumil risti oleh kader dan petugas Pelatihan Tenaga Kesehatan

5. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan



Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 98,10% dari target 100%. Dapat dikatakan belum mencapai target 2024, yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah adanya sasaran ibu bersalin yang melakukan persalinan di luar wilayah fasilitas kesehatan tempat dia terdaftar sebagai sasaran ibu hamil (Biasanya ibu hamil yang pulang kampung untuk melahirkan di rumah orang tua /kabupaten lain) sehingga pelayanan ibu bersalin tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Solusi yang dilakukan :

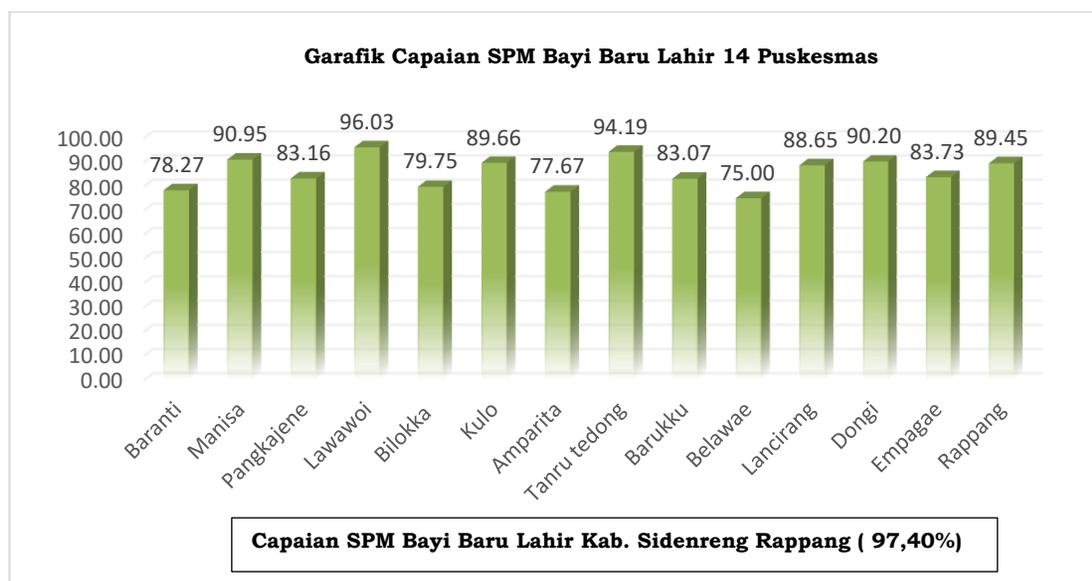
- a) Adanya kegiatan sosialisasi pentingnya ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan dan melaporkan persalinannya jika bersalin di luar wilayah fasilitas kesehatan tempat terdaftar sebagai sasaran ibu hamil.
- b) Adanya kerjasama dengan lintas sektor yang terkait

6. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

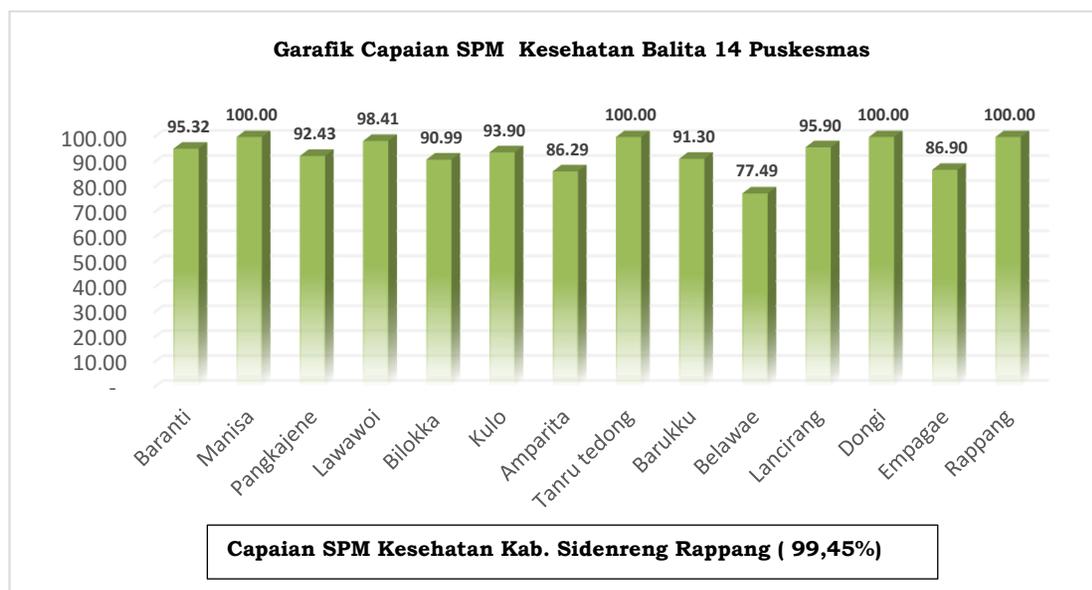
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 97,40% dari target 100%. Dapat dikatakan belum mencapai target 2024, yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah adanya sasaran ibu bersalin yang melakukan persalinan di luar wilayah fasilitas kesehatan tempat dia terdaftar sebagai sasaran ibu hamil (Biasanya ibu hamil yang pulang kampung untuk melahirkan di rumah orang tua /kabupaten lain) sehingga persentase pelayanan bayi baru lahir dari ibu bersalin tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Solusi yang dilakukan :

- Adanya kegiatan sosialisasi pentingnya ibu hamil bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan dan melaporkan persalinannya jika bersalin di luar wilayah fasilitas kesehatan tempat terdaftar sebagai sasaran ibu hamil.
- Adanya kerjasama dengan lintas sektor yang terkait



7. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar



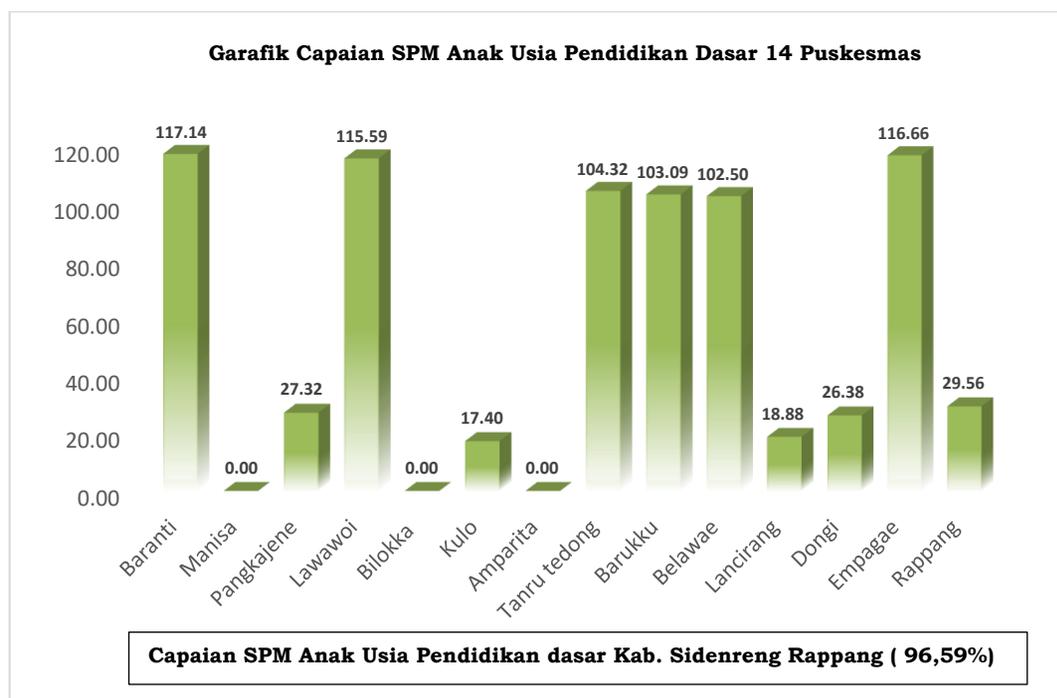
Pelayanan kesehatan balita dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 99,45% dari target 100%. Dapat dikatakan hampir mencapai target 2024, yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah adanya sasaran balita yang sakit saat penimbangan di posyandu sehingga tidak balita tidak datang di posyandu, adanya balita yang datang saat penimbangan di posyandu tapi tidak semua tahapan/prosedur di posyandu di ikuti dan masih banyak ibu yang tidak membawa anak balitanya keposyandu untuk imunisasi/berobat jika sakit dan biasanya ibu balita langsung membelikan

saja obat anaknya di toko obat atau di bawa ke dukun. sehingga pelayanan anak balita tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Solusi yang dilakukan :

- a) Melakukan Edukasi Kepada masyarakat untuk membawa anak balitanya keposyandu terdekat.
- b) Adanya kerjasama dengan lintas sektor yang terkait

8. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar



Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar realisasi capaian tahun 2024 sebesar 96,59% dari target 100%. Dapat dikatakan belum mencapai target tahun 2024, yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah tidak tersedianya buku rapor kesehatanku sesuai dengan jumlah sasaran usia pendidikan dasar. Pelayanan Kesehatan anak usia pendidikan dasar sudah terlaksana 100 % di wilayah kerja Puskesmas (Puskesmas Manisa, Bilokka dan Amparita) hanya terkendala karena tidak adanya rapor kesehatanku untuk anak sekolah sehingga pelayanan usia pendidikan dasar tidak sesuai dengan standar beserta target yang telah ditetapkan.

Solusi yang dilakukan :

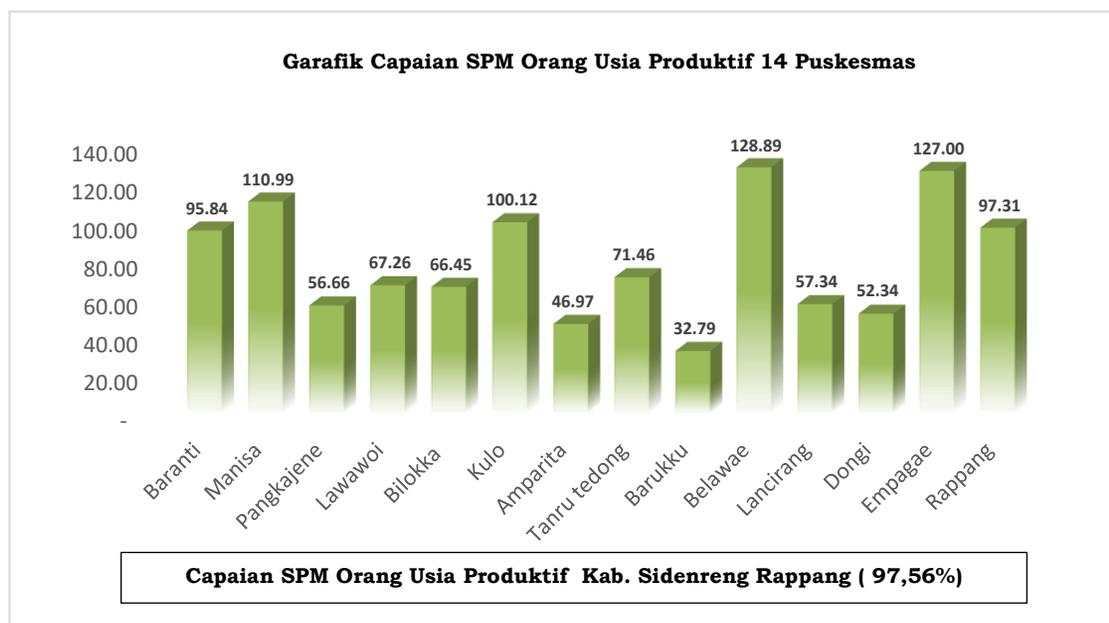
- a) Melakukan Edukasi Kepada sekolah untuk mengadakan buku rapor kesehatanku agar semua anaksekolah sudah memiliki buku rapor kesehatanku.
- b) Adanya kerjasama dengan lintas sektor yang terkait pengadaan buku rapor kesehatanku bagi anak usia pendidikan dasar.

9. Persentase Orang Usia 15-59 tahun /Usia produktif Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan pada usia produktif realisasi capaian tahun 2024 sebesar 97,56% dari target 100%. Dapat dikatakan belum mencapai target tahun 2024, yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah adanya sasaran usia produktif yang tidak datang memeriksakan kesehatannya pada fasilitas kesehatan dan yang paling berpengaruh adalah tingkat kesadaran masyarakat usia produktif untuk periksa kesehatan masih kurang dengan alasan pemeriksaan strip kesehatan yang tidak lengkap seperti pada Puskesmas Barukku (32,79%) dan Puskesmas Amparita (46,97%) sehingga pelayanan usia produktif tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Solusi yang dilakukan :

- a) Melakukan Edukasi masyarakat khususnya kepada masyarakat usia 60 tahun keatas/usia lanjut rajin datang memeriksakan kesehatannya di puskesmas pertiga bulan, jangan sampai nanti sakit baru datang kefasilitas kesehatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya.
- b) Adanya kerjasama dengan lintas sektor yang terkait



10. Persentase Orang Usia 60 tahun / Usia Lanjut Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

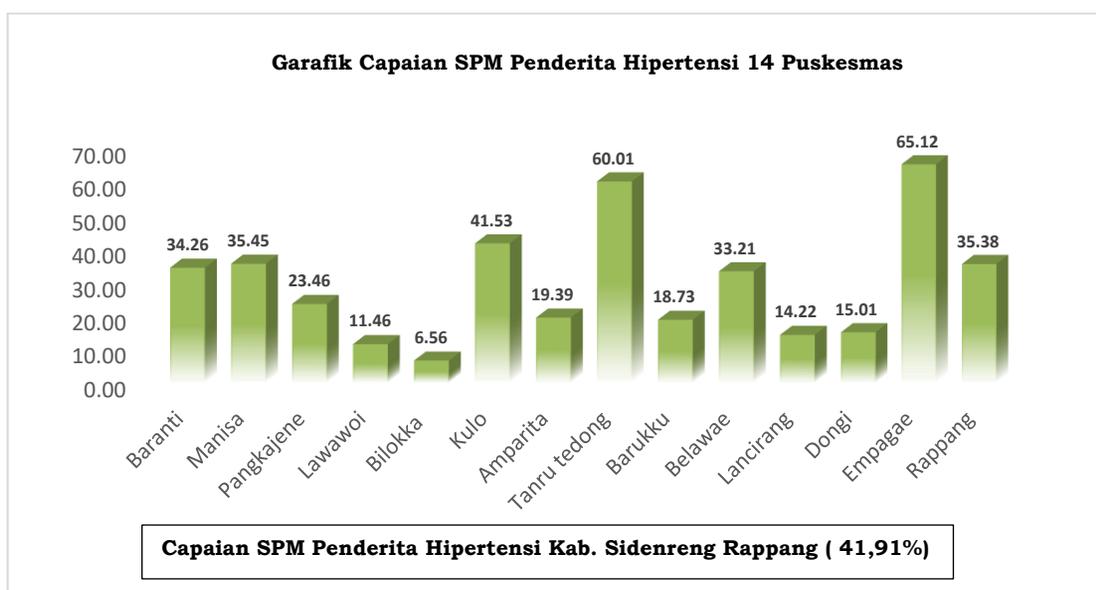


Pelayanan kesehatan pada usia lanjut realisasi capaian tahun 2024 sebesar 83,22% dari target 100%. Dapat dikatakan belum mencapai target tahun 2024, yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah adanya sasaran usia lanjut yang tidak datang memeriksakan kesehatannya pada fasilitas kesehatan atau posbindu lansia (Pos pembinaan terpadu untuk masyarakat usia lanjut 60 tahun keatas di suatu wilayah tertentu) serta tidak tersedianya buku kesehatan lansia di beberapa fasilitas kesehatan yang menjadi pemberi pelayanan kesehatan lansia dan ketersediaan bahan medis habis pakai (strif pemeriksaan) tidak sesuai dengan jumlah sasaran. serta jumlah ketersediaan bahan medis habis pakai (BMHP) di fasilitas kesehatan yang terbatas dan yang paling berpengaruh adalah tingkat kesadaran masyarakat usia lanjut untuk periksa kesehatan masih kurang seperti pada Puskesmas Pangkajene dan Puskesmas Belawae sehingga pelayanan usia lanjut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Solusi yang dilakukan :

- a) Melakukan Edukasi masyarakat khususnya kepada masyarakat usia 60 tahun keatas/usia lanjut rajin datang memeriksakan kesehatannya di puskesmas pertiga bulan, jangan sampai nanti sakit baru datang kefasilitas kesehatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya.
- b) Adanya kerjasama dengan lintas sektor yang terkait

11. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

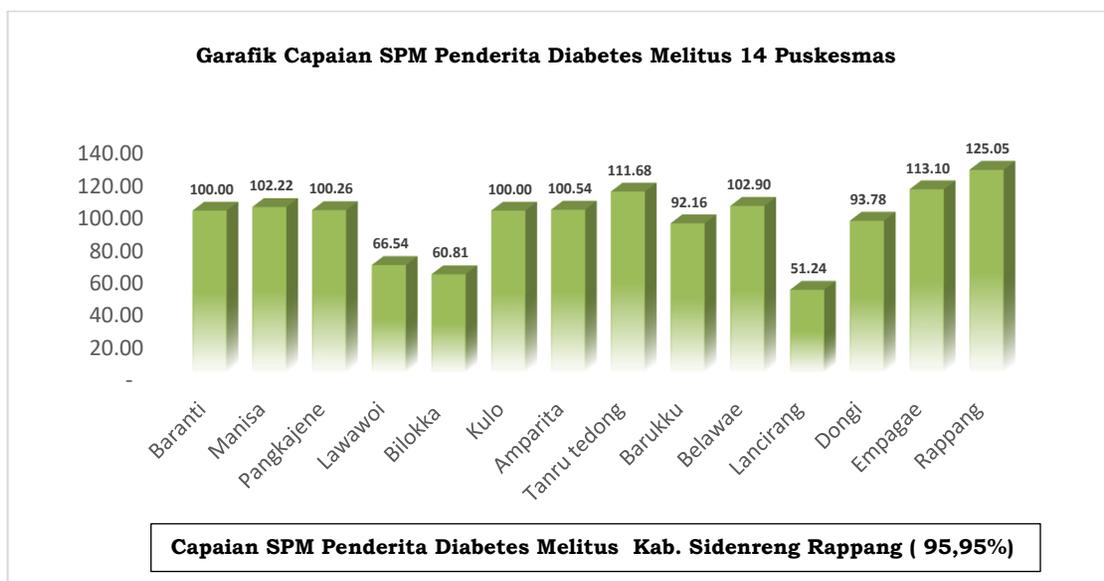


Berdasarkan grafik diatas, Capaian Hipertensi tahun 2024 sebanyak 26.857 (41,91%), dan capaian tertinggi adalah Puskesmas Empagae sebanyak 3834 (65,12%) dengan target 5888, dan Puskesmas Terendah adalah Puskesmas Bilokka sebanyak 365 (6,56%) dengan target 5562. yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah adanya sasaran penderita hipertensi tidak datang memeriksakan kesehatannya pada fasilitas kesehatan atau ketidakpatuhan penderita hipertensi dalam pengobatan dan pemantauan penyakit hipertensi yang di deritanya, serta adanya pencatatan dan pengawasan belum dilakukan secara berkala dan lebih utama adalah pergerakan masyarakat yang kurang responsip terhadap layanan kesehatan hipertensi sehingga pelayanan kesehatan hipertensi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Solusi yang dilakukan :

- a) Melakukan Edukasi masyarakat khususnya kepada masyarakat penderita hipertensi rajin datang memeriksakan kesehatannya di puskesmas pertiga bulan, jangan sampai nanti sakit parah baru datang kefasilitas kesehatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Dan sebaiknya melakukan pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
- b) Adanya kerjasama dengan lintas sektor yang terkait dengan mengadakan pemeriksaan rutin tekanan darah yang menjadi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat daya tarik masyarakat.

12. Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

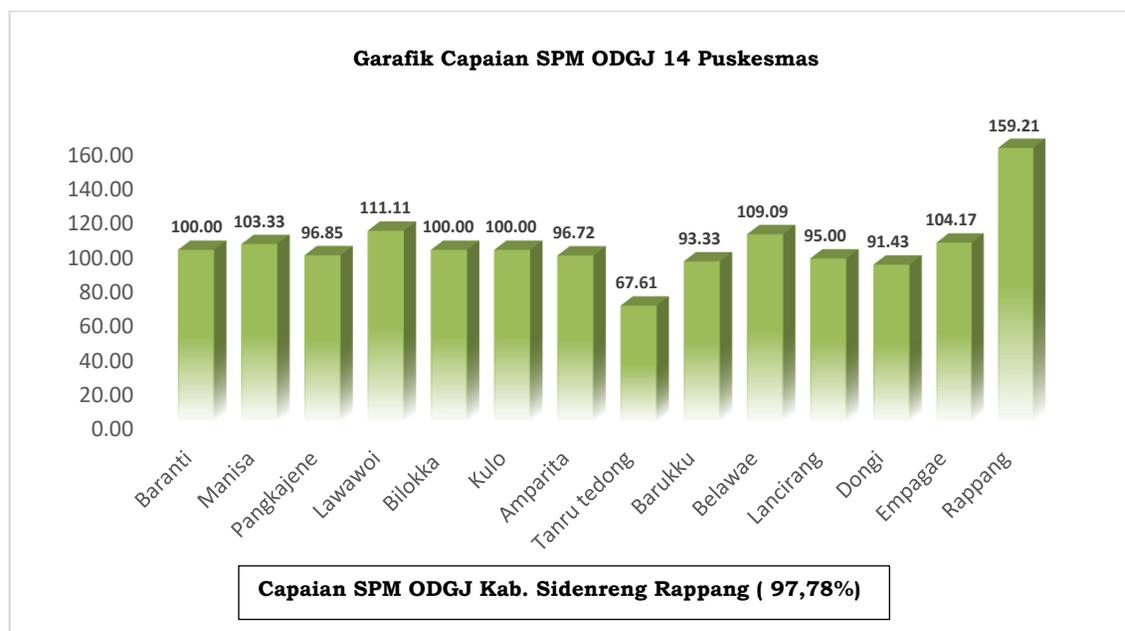


Berdasarkan grafik diatas, Capaian Diabetes Melitus tahun 2024 sebanyak 4357 (95,95%) dari target 4575 dan capaian tertinggi adalah Puskesmas Rappang sebanyak 569 (125%) dan Puskesmas Terendah adalah Puskesmas Lancirang sebanyak 124 (51%) dengan target 242, yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah adanya sasaran penderita diabetes mellitus tidak datang memeriksakan kesehatannya pada fasilitas kesehatan atau ketidak patuhan pasien diabetes mellitus dalam pengobatan dan pemantauan penyakit Diabetes yang di deritanya, serta adanya komorbiditas dan faktor psikososial yang mempengaruhi kepatuhan pasien datang berobat di fasilitas kesehatan dan lebih utam adalah pergerakan masyarakat yang kurang (Malas Berolah Raga) ketergantungan pada kendaran sehingga malas jalan kaki. sehingga pelayanan kesehatan Diabetes Melitus tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Solusi yang dilakukan :

- a) Melakukan Edukasi masyarakat khususnya kepada masyarakat Diabetes Melitus rajin datang memeriksakan kesehatannya di puskesmas pertiga bulan, jangan sampai nanti sakit parah baru datang kefasilitas kesehatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Sebainya melakukan pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
- b) Adanya kerjasama dengan lintas sektor yang terkait dengan mengadakan pemeriksaan rutin gula darah yang menjadi daya Tarik masyarakat.

13. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

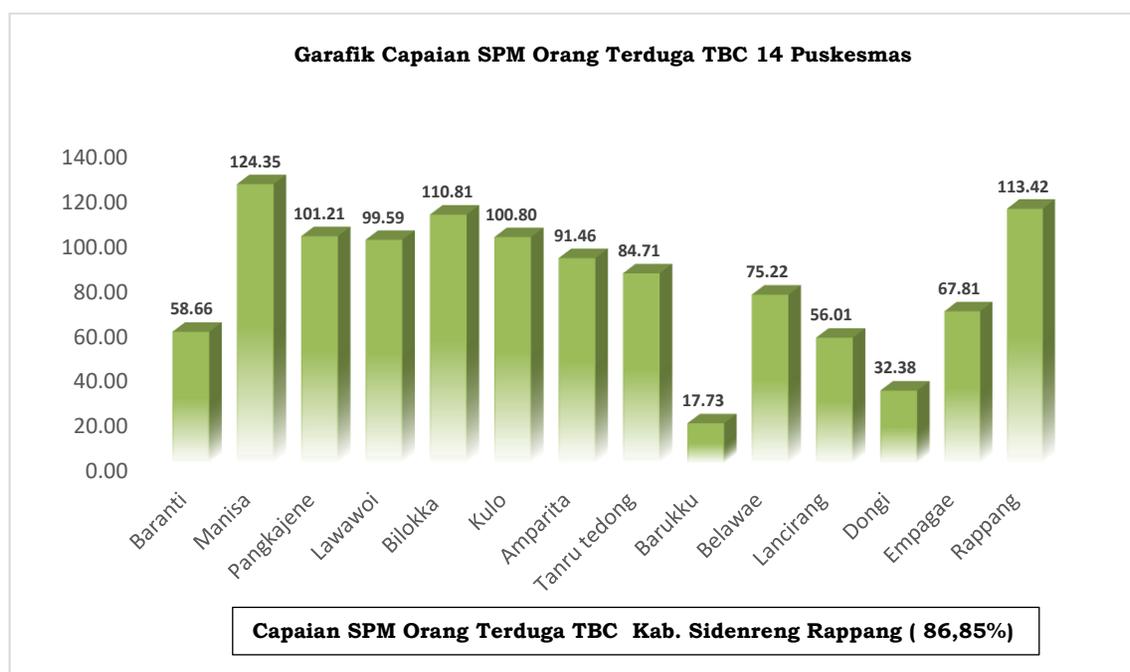


Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) realisasi capaian tahun 2024 sebesar 97,78% dari target 100%. Dapat dikatakan sudah mencapai target sangat baik di tahun 2024, yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah ini berkaitan dengan faktor lingkungan dimana diketahui pemahaman dari masyarakat sendiri masih tergolong kurang. Mereka belum mengetahui pentingnya kesehatan jiwa maka cenderung tertutup dan pemahaman bahwa peran keluarga menjadi faktor utama dan penentu dikarenakan merupakan kontak terdekat dan langsung pada pasien serta adanya pergantian pengelola kegiatan ODGJ pada Puskesmas Tanru Tedong, sehingga pengelola baru kurang memahami pelaksanaan program penanganan orang terduga dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Solusi yang dilakukan :

- a) Melakukan Edukasi masyarakat khususnya kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang terduga dengan gangguan jiwa (ODGJ) datang di puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatannya.
- b) Adanya kerjasama dengan lintas sektor yang terkait
- c) Perlunya dukungan penganggaran terhadap program/kegiatan kesehatan jiwa.

14. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar

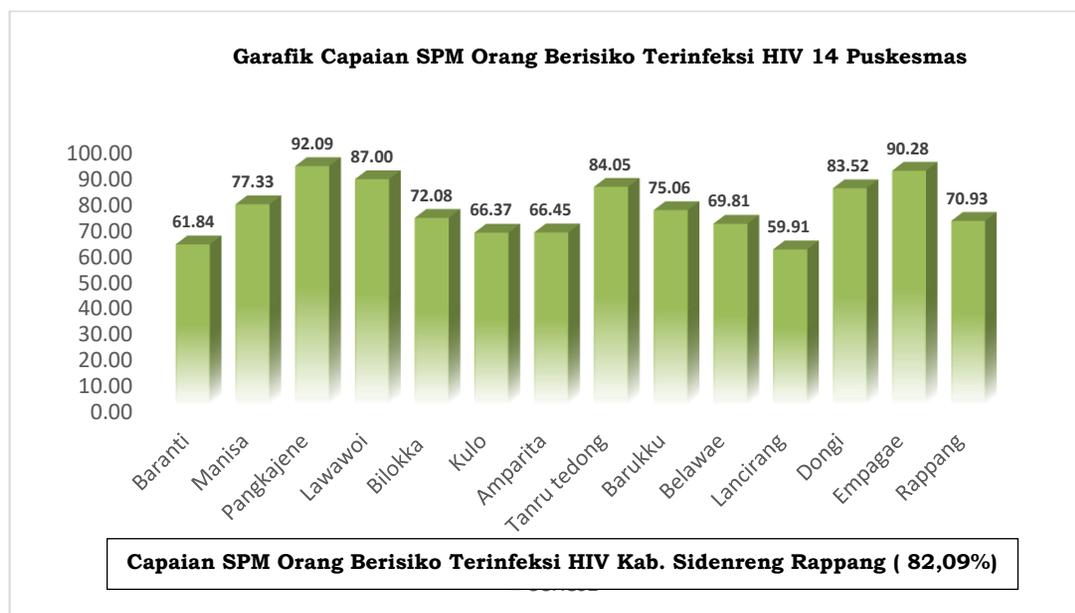


Pelayanan kesehatan orang terduga TBC realisasi capaian tahun 2024 sebesar 86,85% dari target 100%. Dapat dikatakan belum mencapai target di tahun 2024, yang menjadi alasan dasar tidak mencapai target adalah kurangnya orang yang terduga TBC datang berobat di fasilitas kesehatan, kurangnya kegiatan aktif menemukan pasien terduga TBC yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan TBC di puskesmas dan proyeksi data target terduga TBC yang ditentukan oleh program TBC Pusat (Kemenkes RI) sehingga ada wilayah yang banyak target/sasarannya dibandingkan dengan jumlah target yang semestinya di lapangan yang bisa menyebabkan daerah tersebut sulit capai target 100% .

Solusi yang dilakukan :

- a) Melakukan Edukasi masyarakat khususnya kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang terduga dengan TBC datang di puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatannya.
- b) Adanya kerjasama dengan lintas sektor yang terkait
- c) Perlunya dukungan penganggaran terhadap program/kegiatan aktif penemuan orang terduga TBC.

15. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar



Prevalensi HIV/AIDS, dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 82,09% dari target 100%. Dapat dikatakan belum mencapai target 2024, Pada Tahun 2024 jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV sebanyak 6.626 jiwa. 6.626 jiwa ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar agar tidak terinfeksi oleh virus HIV. Kasus HIV sebagian besar terkonsentrasi pada ‘populasi kunci’ yang merupakan populasi paling rentan karena perilaku berisiko tinggi, seperti Pekerja Seks Perempuan (PSP), Laki-Laki Seks dengan Laki-Laki (LSL), waria, dan pengguna narkoba suntik (penasun) serta target ibu hamil dan pasien Tuberkulosis yang tidak tercapai. Stigma dan diskriminasi tetap menjadi hambatan dalam mengakses layanan untuk pencegahan, tes dan pengobatan HIV.

Solusi yang dilakukan antara lain :

- a) Edukasi kepada kelompok risiko terkait pencegahan (seks aman, penggunaan jarum suntik aman pada penasun)
- b) Penyediaan sarana tes HIV di fasilitas kesehatan
- c) Peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko tinggi (pekerja seksual, penasun, waria) melalui kegiatan Mobile VCT
- d) Pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi dengan tidak memberikan ASI Eksklusif kepada bayi dari ibu yang terinfeksi HIV.
- e) Dukungan Sumber daya dari pemerintah dalam penanganan HIV AIDs
- f) Adanya kerjasama lintas sektor yang terkait.

E. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 89,42% berdasarkan skala ordinal dengan kategori TUNTAS MADYA. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja Utama sebagai berikut

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (SPM)

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)
			TARGET	REALISASI	
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	96,09	96,09
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	98,10	98,10
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	97,40	97,40
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	99,45	99,45
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	96,59	96,59
6	Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	97,56	97,56
7	Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	83,22	83,22
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	41,91	41,91
9	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	95,95	95,95
10	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	97,78	97,78
11	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Persen	100	86,85	86,85
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	82,09	82,09
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Persen	100	89,42	TUNTAS MADYA

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Meningkatnya upaya promosi kesehatan terhadap masyarakat
- b. Meningkatnya program upaya pencegahan kematian ibu, bayi, dan balita
- c. Tersedianya anggaran pendukung pelaksanaan program penunjang SPM
- d. Tersedianya SDM yang memadai untuk melaksanakan program penunjang SPM

Berikut adalah program dan kegiatan/subkegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (SPM)

No	Program/Kegiatan dan Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32,441,500	31,005,500	95.57
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	64,218,000	22,621,500	35.23
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	83,098,875	82,861,000	99.71
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16,801,000	15,727,800	93.61
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17,244,000	16,167,900	93.76
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22,414,400	20,552,650	91.69
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20,000,000	19,534,000	97.67
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17,673,000	15,518,950	87.81
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	158,724,500	157,353,000	99.14
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24,999,600	17,698,450	70.79
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	467,582,900	464,569,350	99.36
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	15,870,000	14,731,100	92.82
	Total Pagu	941,067,775	878,341,200	92.82

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 92.82%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja utama capaian SPM sebesar 89,42%, maka dapat dikatakan tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena realisasi keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja.

F. Analisa Program /Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan guna mendukung pencapaian pernyataan kinerja.

A. Program dan Kegiatan Penunjang

1. Program

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2. Kegiatan

- 1) *Kegiatan 1* : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) *Kegiatan 2* : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- 3) *Kegiatan 3* : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 4) *Kegiatan 5* : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- 2) *Kegiatan 6* : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3. *Kegiatan 7* : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan**
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. *Kegiatan 8* : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan**
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. *Kegiatan 9* : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan**
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Program dan Kegiatan Prioritas

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - 1) *Kegiatan 1* : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

 1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 2. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

5. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 6. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- 2) *Kegiatan 2* : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
16. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
20. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
22. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
23. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
24. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
25. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
26. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
27. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
28. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

- 3) *Kegiatan 3* : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

- 4) *Kegiatan 4* : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
4. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- 1) *Kegiatan 2* : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

- 2) *Kegiatan 2* : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

2. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 3) *Kegiatan 3* : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

- 1) *Kegiatan 1* : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- 2) *Kegiatan 3* : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- 3) *Kegiatan 6* : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

- 1) *Kegiatan 1* : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 2) *Kegiatan 3* : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. 2 REALISASI ANGGARAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Pagu total belanja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp 198,765,638,253,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 186,443,940,637,- atau sebesar 94%.

1. Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 161.274.111.596,-
2. Anggaran Puskesmas sebesar Rp. 34,548,387,057,-
3. Anggaran Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp. 2,943,139,600

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

SASARAN Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	198,765,638,253	186,443,940,637	94
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	161,274,111,596	153,525,686,063	95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117,004,278,044	115,089,000,695	98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	362,580,100	264,917,255	73
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	237,994,300	187,051,080	79
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	69,173,000	42,784,155	62
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19,773,200	12,111,710	61
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,656,000	6,018,725	90
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12,805,800	7,015,820	55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,602,800	5,763,565	87
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,575,000	4,172,200	44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105,295,565,756	103,847,198,324	99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	105,193,537,356	103,749,847,814	99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	102,028,400	97,350,510	95

SASARAN Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17,460,000	7,808,465	45
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7,500,000	2,941,500	39
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000	4,866,965	97
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,960,000	-	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17,970,000	17,367,500	97
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17,970,000	17,367,500	97
Administrasi Umum Perangkat Daerah	899,684,300	784,662,560	87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,173,200	1,173,200	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240,821,000	235,150,110	98
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000	14,235,000	95
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,710,600	10,602,680	91
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	6,525,000	44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	610,979,500	516,976,570	85
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5,000,000	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,641,878,000	5,548,237,199	98
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,265,970,000	3,184,900,000	98
Pengadaan Mebel	50,635,000	48,500,400	96
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	304,673,000	299,811,799	98
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,020,600,000	2,015,025,000	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,327,467,588	4,270,519,292	99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	962,567,588	947,219,292	98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,364,900,000	3,323,300,000	99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441,672,300	348,290,100	79
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160,000,000	123,610,900	77
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,112,000	12,937,000	32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159,999,000	148,200,300	93
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81,561,300	63,541,900	78

SASARAN Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42,737,920,552	37,741,072,618	88
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27,655,570,712	23,383,588,868	85
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	5,152,893,190	4,896,914,133	95
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	473,393,148	469,530,850	99
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14,639,649,614	12,508,298,500	85
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	129,516,000	65,927,000	51
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7,209,850,760	5,405,158,385	75
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	50,268,000	37,760,000	75
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14,346,506,640	13,684,238,484	95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32,441,500	31,005,500	96
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	64,218,000	22,621,500	35
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	83,098,875	82,861,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16,801,000	15,727,800	94
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17,244,000	16,167,900	94
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22,414,400	20,552,650	92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20,000,000	19,534,000	98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17,673,000	15,518,950	88
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	158,724,500	157,353,000	99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24,999,600	17,698,450	71
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	467,582,900	464,569,350	99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	15,870,000	14,731,100	93
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	485,024,800	479,125,600	99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3,000,000	2,965,000	99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	517,909,900	493,581,500	95
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	340,739,000	313,055,620	92

SASARAN Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4,160,000	4,072,000	98
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	226,600,000	211,845,250	93
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	98,200,000	86,016,450	88
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	993,878,125	779,836,398	78
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10,071,006,000	9,848,342,166	98
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4,550,000	2,815,380	62
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	29,993,800	10,194,000	34
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	204,438,900	181,370,880	89
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	192,920,000	184,966,000	96
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	38,446,340	38,446,340	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	194,572,000	169,264,700	87
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	499,520,100	459,780,640	92
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	499,520,100	459,780,640	87
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	236,323,100	213,464,626	87
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	24,327,000	14,307,300	59
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131,267,000	122,642,776	93
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	22,563,600	20,153,800	89
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	58,165,500	56,360,750	97
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,086,346,000	567,995,500	52
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3,000,000	2,950,000	98
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3,000,000	2,950,000	98
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	141,937,000	136,895,500	96
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,774,000	4,410,000	92
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	137,163,000	132,485,500	97

SASARAN Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	941,409,000	428,150,000	45
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	941,409,000	428,150,000	45
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	371,648,000	53,819,250	14
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	69,247,000	6,920,000	10
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	69,247,000	6,920,000	10
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137,387,000	42,636,850	31
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137,387,000	42,636,850	31
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	165,014,000	4,262,400	3
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	165,014,000	4,262,400	3
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	73,919,000	73,798,000	100
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38,860,000	38,860,000	100
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	38,860,000	38,860,000	100
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35,059,000	34,938,000	100
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35,059,000	34,938,000	99.65
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2,943,139,600	2,908,307,202	98
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	47,914,300	44,403,682	93
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	23,585,300	21,467,332	91
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	23,585,300	21,467,332	91
SASARAN Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24,329,000	22,936,350	94
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	-	-	0
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	0
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	16,500,000	16,500,000	100
Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	7,829,000	6,436,350	82
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,383,335,300	2,352,303,520	99
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	366,237,000	360,787,720	99
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	252,457,500	248,344,450	98
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	29,019,000	29,012,070	100
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	84,760,500	83,431,200	98
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	182,700,000	182,700,000	100
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	182,700,000	182,700,000	100
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,470,573,800	1,455,987,300	99
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	0
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	189,507,000	186,663,750	98
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,281,066,800	1,269,323,550	99
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	0
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	363,824,500	352,828,500	97
Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2,640,000	1,860,000	70
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	-	0
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	237,859,500	228,553,300	96
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	123,325,000	122,415,200	99
SASARAN Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	511,890,000	511,600,000	100
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2,640,000	2,460,000	93
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	0
Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBanga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2,640,000	2,460,000	93
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	509,250,000	509,140,000	100
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	296,400,000	296,400,000	100
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	212,850,000	212,740,000	100
PUSKESMAS	34,548,387,057	30,009,947,372	87
PUSKESMAS BELAWAE	1,135,507,527	937,441,002	83
PUSKESMAS BILOKKA	2,874,989,543	2,670,199,832	93
PUSKESMAS LANCIRANG	1,695,116,565	1,268,767,282	75
PUSKESMAS BARANTI	2,233,760,566	1,792,789,865	80
PUSKESMAS DONGI	1,623,431,759	1,377,375,660	85
PUSKESMAS EMPAGAE	2,082,654,440	1,664,410,332	80
PUSKESMAS KULO	2,004,926,382	1,935,256,938	97
PUSKESMAS PANGKAJENE	5,256,834,801	4,817,957,326	92
PUSKESMAS BARUKKU	1,990,521,690	1,632,083,345	82
PUSKESMAS TANRUTEDONG	3,733,071,220	2,780,327,284	74
PUSKESMAS LAWAWOI	3,195,717,300	2,883,699,109	90
PUSKESMAS MANISA	1,255,109,600	1,124,987,229	90
PUSKESMAS RAPPANG	2,561,788,337	2,476,683,371	97
PUSKESMAS AMPARITA	2,904,957,327	2,647,968,797	91

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran program, kegiatan dan Subkegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebesar **Rp.198,765,638,253,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 186,443,940,637,-** atau sekitar 94%. Realisasi terendah yaitu pada realisasi sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan hanya terealisasi sebesar 3%

(Bahwa tim teknis pelaksana kegiatan pengawasan sarana Apotek /TO dan pengawasan IRTP termasuk untuk pengujian sampel produk mengalami kendala dalam merealisasikan anggaran disebabkan oleh minimnya personil dibandingkan jumlah sarana apotek dan TO dan ditambah sarana IRTP yang ada di wilayah kerja kami, sehingga kedepan kami akan membentuk Tim teknis pelaksana menjadi 2 tim diantaranya tim pengawasan sarana apotek/TO dan tim pengawasan sarana IRTP termasuk untuk pengujian sampel produk. Dengan memberdayakan tenaga kompeten (tenaga DFI dan PKP) dari instalasi farmasi kabupaten supaya dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dan merealisasikan anggaran yang tersedia di DPA) serta sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 32%. Rendahnya realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adanya bonus dari samsat untuk mobil ambulance dimana mobil ambulance hanya dikenakan pajak sebesar Rp.3000,-

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2023 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.23,805,135,295,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp.20,748,714,914** atau 87,16%.

Tabel :

Realisasi Pagu pendapatan Puskesmas Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	Pagu Pendapatan	Realisasi Pagu Pendapatan	%
1	Puskesmas Bilokka	3,269,684,626	2,804,343,561	85.77
2	Puskesmas Kulo	1,300,822,939	1,232,478,590	94.75
3	Puskesmas Pangkajene	5,193,932,366	4,431,875,714	85.33
4	Puskesmas Tanru Tedong	4,941,928,020	4,065,306,085	82.26
5	Puskesmas Rappang	1,807,676,337	1,793,119,250	99.19
6	Puskesmas Amparita	2,024,321,327	1,960,024,000	96.82
7	Puskesmas Belawae	435,580,527	319,713,171	73.40
8	Puskesmas Lawawoi	1,479,366,566	1,132,781,562	76.57
9	Puskesmas Manisa	1,022,309,759	839,154,919	82.08
10	Puskesmas Lancirang	114,368,800	114,368,800	100
11	Puskesmas Baranti	235,200,000	235,200,000	100
12	Puskesmas Barukku	1,015,168,690	863,629,412	85.07
13	Puskesmas Dongi	123,200,000	123,000,000	99.84
14	Puskesmas Empagae	604,759,600	596,904,112	98.70
	Total	23,568,319,557	20,511,899,176	87.03

Belanja pendapatan daerah khusus bidang kesehatan berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi – strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RKPD) Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang rasional dan proporsional;
2. Meningkatkan efisiensi Pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Upaya – upaya efektif dalam penggalan sumber - sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus tergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber – sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan kedalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain – lain Pendapatan yang sah yang masing – masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.



BAB 4 PENUTUP

**LAPORAN LKJIP
TAHUN 2024**

**DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang harus memiliki sasaran yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi. Sasaran Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun berdasarkan perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026. Upaya Perwujudan pencapaian sasaran tersebut dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi yaitu mengarahkan, mengkoordinasikan, membangun harmonisasi dan mengintegrasikan berbagai kebijakan dalam bidang kesehatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan perwujudan tujuan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan Sidenreng Rappang sebagai Sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing.

Dokumen LKJIP ini berupaya memaparkan sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024, dengan seluruh hasil capaiannya sangat baik. Persentase capaian kinerja atas indikator sasaran melalui penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 mencapai target. Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan pagu P-APBD Rp. Rp.198,765,638,253,- dengan realisasi sebesar Rp. 186,443,940,637,- atau 94 %.

Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 antara lain komitmen tenaga kesehatan dengan masyarakat untuk mengedepankan prinsip promotif dan preventif. Di samping itu, semakin selarasnya berbagai kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mencapai hidup sehat secara mandiri. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

- A. Terbatasnya tenaga, baik segi kuantitatif maupun kualitatif jika dibandingkan dengan jumlah penduduk

- B. Sarana dan Prasarana serta Alat Kesehatan di bidang Kesehatan belum mencapai ideal.
- C. Kondisi alam berupa Cuaca dan geografis yang memicu terjadinya bencana (banjir) di sebagian wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan banyaknya genangan air mempermudah perkembangbiakan nyamuk dan sumber penularan penyakit malaria, Demam berdarah dan penyakit lainnya.

B. LANGKAH KEDEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain :

1. Pemanfaatan dan pemerataan sarana prasarana serta alat kesehatan yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan secara efektif.
2. Pemanfaatan SDM Kesehatan dan tenaga kontrak yang mendukung jasa pelayanan kesehatan yang tersedia.
3. Sosialisasi dan pembinaan secara intensif ke puskesmas.
4. Memperkuat kerjasama lintas sektor dan pihak ketiga yang dapat mendukung pembangunan kesehatan.
5. Pengefektifan sistem keuangan dan anggaran
6. Prioritas upaya kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif di samping upaya kuratif dan rehabilitatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan harapan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Tahun 2024.



LAMPIRAN

**LAPORAN LKJIP
TAHUN 2024**

**DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

I.

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN TA DAN SUB KEGIATAN T.A 2024

DINAS KESEHATAN KAB. SIDENRENG RAPPANG

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	198,765,638,253	186,443,940,637	94			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	161,274,111,596	153,525,686,063	95			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117,004,278,044	115,089,000,695	98			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	362,580,100	264,917,255	73			
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	237,994,300	187,051,080	79	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	69,173,000	42,784,155	62	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19,773,200	12,111,710	61	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,656,000	6,018,725	90	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12,805,800	7,015,820	55	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,602,800	5,763,565	87	3 Laporan	3 Laporan	100
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,575,000	4,172,200	44	3 Laporan	3 Laporan	100
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105,295,565,756	103,847,198,324	99			
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	105,193,537,356	103,749,847,814	99	1205 Orang/bulan	1206 Orang/bulan	100
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	102,028,400	97,350,510	95	3 Laporan	3 Laporan	100
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17,460,000	7,808,465	45			
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7,500,000	2,941,500	39	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000	4,866,965	97	3 Laporan	3 Laporan	100
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,960,000	-	0	3 Laporan	0	-
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17,970,000	17,367,500	97			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17,970,000	17,367,500	97	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	899,684,300	784,662,560	87			
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,173,200	1,173,200	100	16 Paket	16 Paket	100
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240,821,000	235,150,110	98	16 Paket	16 Paket	100
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000	14,235,000	95	16 Paket	16 Paket	100
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,710,600	10,602,680	91	17 Paket	17 Paket	100
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	6,525,000	44	16 Laporan	16 Laporan	100
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	610,979,500	516,976,570	85	16 Laporan	16 Laporan	100
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5,000,000	0	0	16 Dokumen	0	-
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,641,878,000	5,548,237,199	98			
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,265,970,000	3,184,900,000	98	1 Unit	1 Unit	100
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	50,635,000	48,500,400	96	1 Unit	1 Unit	100
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	304,673,000	299,811,799	98	1 Unit	1 Unit	100
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,020,600,000	2,015,025,000	100	3 Unit	3 Unit	100
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,327,467,588	4,270,519,292	99			
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	962,567,588	947,219,292	98	17 Laporan	17 Laporan	100
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,364,900,000	3,323,300,000	99	4 Laporan	4 Laporan	100
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441,672,300	348,290,100	79			
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160,000,000	123,610,900	77	10 Unit	8 Unit	80
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,112,000	12,937,000	32	257 Unit	90 Unit	33
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159,999,000	148,200,300	93	3 Unit	3 Unit	100
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81,561,300	63,541,900	78	1 Unit	1 Unit	100

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
1.02.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42,737,920,552	37,741,072,618	88			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27,655,570,712	23,383,588,868	85			
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	5,152,893,190	4,896,914,133	95	1 Unit	1 Unit	100
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	473,393,148	469,530,850	99	1 Unit	1 Unit	100
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14,639,649,614	12,508,298,500	85	1 Unit	1 Unit	100
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	129,516,000	65,927,000	51	5 Unit	5 Unit	100
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7,209,850,760	5,405,158,385	75	55 Paket	42 Paket	76
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	50,268,000	37,760,000	75	14 Paket	14 Paket	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14,346,506,640	13,684,238,484	95			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32,441,500	31,005,500	96	5958 Orang	5694 Orang	96
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	64,218,000	22,621,500	35	6700 Orang	2,360 Orang	35
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	83,098,875	82,861,000	100	5414 Orang	5,399 Orang	100
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16,801,000	15,727,800	94	24952 Orang	23,358 Orang	94
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17,244,000	16,167,900	94	54670 Orang	51,258 Orang	94
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22,414,400	20,552,650	92	194892 Orang	178,704 Orang	92
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20,000,000	19,534,000	98	20907 Orang	20,420 Orang	98
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17,673,000	15,518,950	88	17810 Orang	15,639 Orang	88
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	158,724,500	157,353,000	99	2768 Orang	2,744 Orang	99
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24,999,600	17,698,450	71	550 Orang	389 Orang	71
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	467,582,900	464,569,350	99	5839 Orang	5,801 Orang	99
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	15,870,000	14,731,100	93	7663 Orang	7,113 Orang	93

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	485,024,800	479,125,600	99	2 Dokumen	2 Dokumen	99
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3,000,000	2,965,000	99	1 Dokumen	1 Dokumen	99
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	517,909,900	493,581,500	95	1 Dokumen	1 Dokumen	95
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	340,739,000	313,055,620	92	1 Dokumen	1 Dokumen	92
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4,160,000	4,072,000	98	1 Dokumen	1 Dokumen	98
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	226,600,000	211,845,250	93	1 Dokumen	1 Dokumen	93
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	98,200,000	86,016,450	88	220 Orang	193 Orang	88
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	993,878,125	779,836,398	78	2 Dokumen	2 Dokumen	78
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10,071,006,000	9,848,342,166	98	2 Dokumen	2 Dokumen	98
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4,550,000	2,815,380	62	10 Paket	10 Paket	62
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	29,993,800	10,194,000	34	2 Dokumen	2 Dokumen	34
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	204,438,900	181,370,880	89	1 Dokumen	1 Dokumen	89
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	192,920,000	184,966,000	96	2 Laporan	2 Laporan	96
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	38,446,340	38,446,340	100	890 Orang	890 Orang	100
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	194,572,000	169,264,700	87	1 Dokumen	1 Dokumen	87
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	499,520,100	459,780,640	92			
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	499,520,100	459,780,640	87	17 Dokumen	17 Dokumen	100
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	236,323,100	213,464,626	87			
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	24,327,000	14,307,300	59	17 Unit	17 Unit	100
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131,267,000	122,642,776	93	17 Unit	17 Unit	100
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	22,563,600	20,153,800	89	16 Unit	16 Unit	100
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	58,165,500	56,360,750	97	1 Dokumen	1 Dokumen	100

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,086,346,000	567,995,500	52			
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3,000,000	2,950,000	98			
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3,000,000	2,950,000	98	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	141,937,000	136,895,500	96			
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,774,000	4,410,000	92	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	137,163,000	132,485,500	97	4 Dokumen	4 Dokumen	100
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	941,409,000	428,150,000	45			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	941,409,000	428,150,000	45	90 Orang	90 Orang	80
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	371,648,000	53,819,250	14			
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	69,247,000	6,920,000	10			
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	69,247,000	6,920,000	10	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137,387,000	42,636,850	31			
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137,387,000	42,636,850	31	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	165,014,000	4,262,400	3			
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	165,014,000	4,262,400	3	100 Unit	100 Unit	14

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	73,919,000	73,798,000	100			
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38,860,000	38,860,000	100			
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	38,860,000	38,860,000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35,059,000	34,938,000	100			
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35,059,000	34,938,000	99.65	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2,943,139,600	2,908,307,202	98.82			
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	47,914,300	44,403,682	93			
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	23,585,300	21,467,332	91			
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	23,585,300	21,467,332	91	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24,329,000	22,936,350	94			
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	-	-	0	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	0	1 Laporan	1 Laporan	-
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	16,500,000	16,500,000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	7,829,000	6,436,350	82	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,383,335,300	2,352,303,520	99			
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	366,237,000	360,787,720	99			
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	252,457,500	248,344,450	98	1 Laporan	1 Laporan	100
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	29,019,000	29,012,070	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	84,760,500	83,431,200	98	11 Organisasi	11 Organisasi	100
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	182,700,000	182,700,000	100			
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	182,700,000	182,700,000	100	45 Orang	45 Orang	100
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,470,573,800	1,455,987,300	99			
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	0	1 Laporan	1 Laporan	-
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	189,507,000	186,663,750	98	45 Orang	45 Orang	100
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,281,066,800	1,269,323,550	99	11 Unit	11 Unit	100
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	0	1 Laporan	1 Laporan	-
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	363,824,500	352,828,500	97			
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2,640,000	1,860,000	70	11 Organisasi	11 Organisasi	100
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	-	0	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	237,859,500	228,553,300	96	11 Unit	11 Unit	100
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	123,325,000	122,415,200	99	11 Kampung	11 Kampung	100
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	511,890,000	511,600,000	100			
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2,640,000	2,460,000	93			
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	0	11 Unit	11 Unit	-
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2,640,000	2,460,000	93	2 Laporan	2 Laporan	100

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	509,250,000	509,140,000	100			
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	296,400,000	296,400,000	100	11 laporan	11 laporan	100
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	212,850,000	212,740,000	100	11 laporan	11 laporan	100
	PUSKESMAS	34,548,387,057	30,009,947,372	87			
1	PUSKESMAS BELAWAE	1,135,507,527	937,441,002	83			
2	PUSKESMAS BILOKKA	2,874,989,543	2,670,199,832	93			
3	PUSKESMAS LANCIRANG	1,695,116,565	1,268,767,282	75			
4	PUSKESMAS BARANTI	2,233,760,566	1,792,789,865	80			
5	PUSKESMAS DONGI	1,623,431,759	1,377,375,660	85			
6	PUSKESMAS EMPAGAE	2,082,654,440	1,664,410,332	80			
7	PUSKESMAS KULO	2,004,926,382	1,935,256,938	97			
8	PUSKESMAS PANGKAJENE	5,256,834,801	4,817,957,326	92			
9	PUSKESMAS BARUKKU	1,990,521,690	1,632,083,345	82			
10	PUSKESMAS TANRUTEDONG	3,733,071,220	2,780,327,284	74			
11	PUSKESMAS LAWAWOI	3,195,717,300	2,883,699,109	90			
12	PUSKESMAS MANISA	1,255,109,600	1,124,987,229	90			
13	PUSKESMAS RAPPANG	2,561,788,337	2,476,683,371	97			
14	PUSKESMAS AMPARITA	2,904,957,327	2,647,968,797	91			

II. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGITAN TAHUN 2024

1. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
2. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
3. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak

b. SOLUSI PELAKSANAAN KEGITAN TAHUN 2024

1. SK Penetapan Pelaksana Kegiatan Semestinya di Buat awal Tahun
2. Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak di laksanakan lebih cepat jadi tidak mepet

III. INOVASI YANG DI HASILKAN

Tidak ada

IV. PENGHARGAAN YANG DI PEROLEH

1. TERBAIK PERTAMA PENILAIAN INDEKS KELUARGA SEHAT TERTINGGI PIS-PK TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024
2. PERINGKAT III KABUPATEN DENGAN CAKUPAN TERTINGGI KONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH (TTD) BAGI REMAJA PUTRI
3. PENGHARGAAN KEPADA DINAS KESEHATAN KAB SIDRAP ATAS KEBERHASILAN DALAM PENCAPAIAN TARGET NASIONAL 95 % PADA PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO TAHUN 2024
4. JUARA HARAPAN I KATEGORI DALAM PENILAIAN (GERAKAN TOILET SEHAT, BERSIH, AMAN DAN NYAMAN BERSAMA MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN (GETOL BERTAMSYA)



Pangkajene, 10 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang

M. HAMUDDIN, S.Si, M.Si, Apt

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19760824 200901 1 002

